



KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Oleh: Suniti
Jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: suniti.iaincrbn@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan media yang tepat untuk mengenalkan multicultural. Inti dari keberhasilan multicultural adalah keinginan untuk menerima budaya kelompok lain, etnik, gender, bahasa dan keberanekaan agama sebagai suatu bentuk keseimbangan dan membentuk satu kesatuan. Pendidikan multicultural harus didekati dengan strategi pembelajaran dan kurikulum yang mengarahkan kepada proses pembelajarannya. Hal penting yang dibutuhkan adalah mendesain beberapa isi materi kurikulum pendidikan bagi para siswa agar dapat menerima orang lain secara sama dan menghormati agama mereka, budaya, dan perbedaan etnik. Oleh karenanya model kurikulum dengan beraneka ragam tema adalah suatu model kurikulum yang sangat dianjurkan.

Kata Kunci: Pendidikan, Multikultural, Model Kurikulum Multikultural

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan sejumlah pulau besar dan memiliki penduduk yang berjumlah kurang lebih 240 juta jiwa serta memiliki karakterer alam yang berbeda. Karakter alam akan, membentuk karakter dan budaya masyarakat yang berbeda pula, komunitas masyarakat yang hidup di pedesaan akan berbeda degan karakter masyarakat yang hidup di kota, begitu pula sebaliknya, masyarakat yang hidup di daerah pantai akan memiliki karakter dan budaya berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan.

Karakter budaya yang khas pada masyarakat tersebut dapat diamati pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki daerah teritorial dan budaya masing-masing yang khas (Zakiyuddin, 2003 : 142). Suku bangsa dalam istilah teknis antropologi dikenal sebagai kelompok etnis. Setiap anggota etnis merasa sebagai satu kesatuan yang bearsal dari satu keturunan nenek moyang yang sama, dengan bahasa dan agama yang sama pula sebagai identitas sosial yang membedakan antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya.

Sebagai masyarakat yang multi etnis, di Indonesia terdapat ratusan kelompok etnis beserta substansinya masing-masing. Walaupun Indonesia merupakan Negara berpenduduk sangat majemuk, tetapi secara moril dipersatukan dalam Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) dengan semboyannya “*Bhehineka Tunggal Ika*” (Berbeda Namun Satu Juga). Kemajemukan tersebut tidak hanya karena jumlah etnis yang banyak, tetapi juga karena terdiri dari berbagai perbedaan khas budaya yang melekat pada setiap etnis, baik yang bersifat horizontal maupun vertical (Said Agil 2006 : 130).

Perbedaan yang bersifat vertical menyangkut perbedaan lapisan atas bawah baik bidang sosial, ekonomi maupun politik dan pendidikan. Sedangkan perbedaan horizontal meliputi perbedaan kesatuan sosial seperti perbedaan bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat dan kuliner, serta simbol-sombol lainnya yang melekat dalam setiap etnis.

Apabila kompleksitas antar etnis berproses dalam kondisi emosi tidak stabil, diperkirakan berpotensi lebih sensitive terhadap pembentukan konflik antar etnis.

Berpangkal dari sikap fanatik dan promodialisme, walaupun di satu sisi perbedaan budaya dan cara penilaian suatu etnis terhadap budaya yang berbeda merupakan hikmah dan berkah dalam dinamika kehidupan sosial, tetapi disisi lain karena setiap anggota etnis mersa paling memiliki nilai dan mersa bahwa nilai budaya lebih baik dari budaya etnis liannya, mungkin hal kecil sekalipun akan dihadapi sebagai persoalan yang serius dan terdramatisir (J.V. Vergeuwen, 2004: 520).

Persoalan-persoalan sebagaimana tersebut diatas tidak sedikit sering muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga turut menyuburkan konflik dan mengganggu keharmonisan kehidupan sosial.

Dalam dunia pendidikan pun tidak luput dari persoalan-persoalan yang kini menjadi tantangan besar seperti konflik dan kekerasan antar pelajar, kekerasan antara guru dengan siswanya yang kadang berdampak pula pada konflik masyarakat. Kekerasan tampaknya semakin akrab dengan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang semakin hari semakin kompleks paling tidak meminimalisir fenomena-fenomena kekerasan dalam berbagai level membutuhkan kontribusi dunia pendidikan. Kekerasan tidak bisa diselesaikan secara tuntas dengan pendekatan keamanan semata. Pendekatan pendidikan memiliki kontribusi yang lebih luas dalam memberikan solusi penyelesaian atau meminimalisir konflik karena mampu membangun kesadaran secara sistematis terhadap pentingnya kehidupan berdamai.

Hamid Hasan yang dikutip Ngainun Naim menyatakan, bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, mulai dari dimensi social, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar juga berpengaruh terhadap kemampuan anak didik untuk berproses dalam belajar serta berpengaruh dalam mengelola informasi menjadi suatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi variable bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum yang ada, baik kurikulum sebagai proses maupun kurikulum sebagai hasil. Oleh karena itu keragaman tersebut harus menjadi faktor yang seyogyanya diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi, model dan pelaksanaan kurikulum (2008:188).

Pengalaman pendidikan era Orde Baru dapat dijadikan titik pijak dan menjadi bahan refleksi bersama. Pola-pola penyeragaman yang tidak menghargai multikultural dalam kenyataannya justru menjadi pemicu lahirnya beragam persoalan kemasyarakatan.

Hal ini dapat dimaklumi, karena salah satu usaha yang diyakini mampu menyatakan cita-cita dan mimpi-mimpi manusia adalah pendidikan. Secara sosiologis, pendidikan selain memberikan amunisi dalam memasuki masa depan, ia juga memiliki hubungan dialektikal dengan transformasi sosial masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Berbagai pola dan corak sistem pendidikan menggambarkan corak dari tradisi dan budaya sosial masyarakat yang ada. Karena itu, hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah suatu sistem pendidikan dibangun guna melaksanakan “amanah masyarakat”.

Pendidikan sendiri memiliki berbagai ragam fungsi misalnya, sebagai alat untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentuk watak, alat pelatihan ketrampilan, alat mengasah otak, alat meningkatkan pekerjaan dan alat menanamkan nilai-nilai dan moral keagamaan serta alat pembentukan kesadaran berbangsa dan bernegara dan fungsi lainnya.

Untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut di atas memang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak ringan, karena untuk implementasinya dapat diperlukan reformasi yang mencakup seluruh dimensi pendidikan seperti kurikulum, evaluasi, guru, dan semua komponen pendidikan lainnya. Karena pendidikan memiliki tugas untuk mengembangkan kesadaran atas setiap warga negara terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakat dan negara, tetapi juga terhadap umat manusia secara keseluruhan (H.A.R. Tilaar. 1999: 4).

B. Pendidikan Multikultural

Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan yaitu “pedagogi” dan “pedagogik”. Pedagogi berarti pendidikan, sedang pedagogik berarti ilmu pendidikan (Mahfu, 201: 32). Secara sederhana, pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengemabangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Driyakarta menyatakan bahwa, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik. Hal yang mengandung pengertian bahwa melalui pendidikan manusia

akan menyadari siapa dirinya dan hubungannya dengan makhluk lain yang berda disekitarnya.

Dalam pengertian yang luas pendidikan sama dengan hidup, dalam arti segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidup. Sehingga pendidikan tidak berlangsung dalam batas usia tertentu tetapi sepanjang hidup manusia (Redja Mudyahardjo, 2001: 45).

Sedang pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kultural. Pendidikan secara sederhana dan umum, bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan (Mahfud, 2011: 22).

Secara terminologi, pendidikan multikultural meminjam pendapat Andersen dan Cusher, bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaimin el Ma'hady berpendapat, bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global). Pendidikan multikultural dapat juga diartikan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama) (Masngud, 2010: 19). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Pendidikan juga dipahami sebagai proses memanusiakan manusia. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia.

Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau *prejudice* untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju.

Pendidikan dengan wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank adalah konsep, idea tau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*self of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara (James.A Bank, 2001: 23). Sementara menurut Soni Nieto, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang konperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralis (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dan lain sebagainya) yang terefleksi diantara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultural ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan diantara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar-mengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan pedagogis kritis, refleksi dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam keadilan sosial. Sementara itu, Bikhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai “*an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentrism and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives*” (Parekh, 1999: 177).

Dalam pelaksanaannya, Banks menjelaskan lima dimensi yang harus ada yaitu, *Pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang mewujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada. *Ketiga*, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap element yang sama. *Kelima*, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal yang lima ini adalah tujuan dari pendidikan

multikultural yaitu agar sekolah menjadi element pengentas sosial (transformasi sosial dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan.

Paulo Freire berpendapat, pendidikan bukan merupakan “*menara gading*” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya menggunakan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya (Paulo Freire,1984: 4). Mengacu pada pendapat Freire bahwa pendidikan multikultural menentang pendidikan yang hanya berorientasi bisnis. Pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ke depan adalah pendidikan yang dapat mengakomodir semua jenis kecerdasan, tidak hanya kecerdasan ketrampilan semata, melainkan kecerdasan ganda yang populer disebut *multiple inttelibence*. Menurut Howard Gardner dalam Muhammad Alwi yang harus dikembangkan secara seimbang adalah *intelegensi linguistik, intelegensi Matematis logis, intelegensi ruang – spesial, intelegensi kinestetik-badani, intelegensi musik, intelegensi interpersonal, intelegensi intrapersonal, intelegensi lingkungan/naturalis* (perkembangan selanjutnya dari intelegensi intra personal), dan intelegensi eksistensial (perkembangan lebih lanjut dari intelegensi lingkungan) (Alwi, 2011: 184-185).

Pendidikan multikultural diharapkan di Indonesia dapat menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di masyarakat, atau paling tidak mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan. Selanjutnya pendidikan juga harus mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesaian materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan susku, agama, ras, etnis, dan budaya masyarakat Indonesia yang multukultural.

Alasan lain yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang berlatar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam lembaga pendidikan.

Sementara H.A.R. Tilaar, menggaris bawahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu:

Pertama, pendidikan multikultural haruslah berdimensi “*right to culture*” dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschoung* yang terus berproses dan merupakan bagian dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normative yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi acuan tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat*, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme, dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama. *Kelima*, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai Negara bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada. *Keenam*, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis masyarakat Indonesia yang dipahami oleh seluruh komponen sosialbudaya yang plural (H.A.R. Tilaar, 2002:185).

Choerul Mahfud menyarankan, untuk mewujudkan agar pendidikan multicultural di Indonesia dapat terwujud perlu memperimbangkan kombinasi model yang ada, agar, seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multicultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi: (1) transformasi diri, (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, (3) transformasi masyarakat.

Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran perdamaian sudah tidak ada lagi. Dengan demikian pendidikan multikultural sekaligus untuk melatih dan

membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dilingkungan mereka.

Tujuan pendidikan multikultural, Tri Astutik Haryati membedakan menjadi tiga macam yaitu tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Yang terkait dengan aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan cultural, toleransi cultural, penghargaan terhadap identitas cultural, sikap responsive terhadap budaya, ketrampilan untuk menghindari dan meresoludi konflik. Kemudian yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menterjemahkan perilaku cultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif cultural. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural (Tri Astuti, 2009 : 185).

C. Kurikulum Multikultural

Berbagai pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para pakar, antara pakar yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersendiri dalam menterjemahkan kurikulum. Namun dari perbedaan pemikiran dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan itu terdapat pada bagaimana memandang kurikulum secara sempit atau secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai selesai, untuk mendapatkan ijazah. Diartikan secara luas, kurikulum tidak hanya sebatas mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa selama mengikuti pendidikan, tetapi meliputi segala usaha sekolah yang dapat mempengaruhi belajar siswa.

Ronald C. Doll, mengartikan, kurikulum merupakan pengalaman yang ditawarkan kepada anak didik di bawah bimbingan dan arahan sekolah (Ronald C. Doll, 1974: 22). Dengan pengertian yang hampir sama, Muritz Johnson mengartikan kurikulum sebagai *a structured series of intended learning outcomes* (hal-hal yang tersusun yang diharapkan dicapai oleh anak didik) (Muritz J, 1977: 130). Adapun R.S. Zais membagi kurikulum menjadi dua yaitu kurikulum dokumen (*document Curriculum*) dan kurikulum fungsional (*funcional Curriculum*). Suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, tetapi juga harus dinilai dalam proses pelaksanaannya di kelas (R.S. Zais, 1976: 7).

Berbagai tafsiran tentang kurikulum dapat kita tinjau dari segi lain, sehingga kita peroleh sebagai berikut:

1. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.
2. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain.
3. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, ketrampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
4. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada setiap siswa. Ada kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana (Nasution, 1995: 9).

Mengenai masalah kurikulum senantiasa terdapat pendirian yang berbeda-beda, bahkan sering bertentangan. Ketidakpuasan dengan kurikulum yang

berlaku adalah suatu yang biasa dan akan memberi dorongan untuk merekonstruksi kurikulum yang baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran, kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum merupakan sbsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sisstem sekolah yang menyangkut penentuan kebijakan tentang kurikulum, suasana personalia, dan prosedur pengemabangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurannya.

Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan mengenai jenis, ruang lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Oleh karena itu kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan, yakni sebagai pedoman dan pegangan guru dalam proses pembelajaran.

Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa materi kurikulum pendidikan nasional dari TK hingga SMA, bahkan samapai Perguruan Tinggi, dari Sabang sampai Merauke, dibuat secara seragam tanpa memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Padahal setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik menyangkut potensi alam, budaya, agama, relasi sosial, maupun aspek-aspek lainnya. Antara Jawa dengan luar Jawa, desa dengan kota, dan antara daerah terbuka dengan daerah terisolasi mempunyai potensi berbeda, tetapi diterapkan kurikulum dan alat evaluasi yang sama. Akibatnya, selain terjadi ketimpangan, pendidikan juga membuat anak didik tercerabut dari lingkungannya, sebab apa yang mereka pelajari di sekolah berbeda jauh dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Karena masyarakat kita majemuk, maka kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses anak didik menjadi manusia demokratis, dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai, tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis, dan menghormati hak orang lain.

Memperhatikan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, maka kurikulum pendidikan multikultural seharusnya berisi tentang materi-materi yang

dapat menghadirkan lebih dari satu perspektif tentang suatu fenomena kultural. Untuk menghadirkan keragaman perspektif dalam kurikulum ini, menurut James A. Bank yang dikutip Zoran Minderovic dapat dilakukan dengan empat tahapan, yaitu: (a) tahap kontribusi (*contribution level*), (b) tahap penambahan (*additive level*), (c) tahap perubahan (*transformative level*), dan (d) tahap aksi sosial (*social action level*).

Bila pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada kebudayaan minoritas tertentu, maka pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru, misalnya tema-tema yang terkait dengan multikulturalisme, dengan tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial. Selanjutnya, bila pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi para siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas, maka pada tahap aksi sosial, kurikulum mengajak para siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi.

Kurikulum berbasis multikultural juga perlu memasukan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain dan kelompok lain.

Demi terwujudnya tujuan kurikulum tersebut, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu: (1) posisi anak didik sebagai subyek dalam belajar; (2) cara belajar anak didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya; (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi anak didik adalah *entry behavior* kultur anak didik; (4) lingkungan budaya anak didik adalah sumber belajar (Hamid Hasan, 2000).

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi (Ngaenun Naim, 2008: 191). Dengan pendidikan multikultural diharapkan lahir kesadaran dan pemahaman secara luas yang diwujudkan dalam sikap yang toleran.

Para ahli kurikulum, seperti Hilda Taba, menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum. Murray Print menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa *Curriculum is a construct of that culture* (Murray Print, 1993:

15). Kebudayaan merupakan keseluruhan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupan sehingga ia tidak saja menjadi landasan dimana kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum.

Indonesia adalah Negara yang kaya dengan budaya, seperti dinyatakan dalam ungkapan “*Bhineka Tunggal Ika*”. Apabila kebudayaan dijadikan salah satu landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikulturalis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi.

Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya
- 2) Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses dan evaluasi
- 3) Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan obyek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik, dan
- 4) Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

Pengembangan kurikulum masa depan berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke arah filosofi kurikulum yang progresif seperti humanize, progresivisme, dan rekonstruksi sosial, yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan dunia.
- 2) Teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari yang mengartikan konten sebagai aspek substantive yang berisikan fakta,

teori, dan generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki anak didik.

- 3) Teori yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi dan politik tidak lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan anak didik dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan anak didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa dan dunia.
- 4) Proses belajar yang dikembangkan untuk anak didik juga harus berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan anak didik belajar secara individualistik dan bersaing secara kompetitiv-individualistik harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan anak didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.
- 5) Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan, dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam, sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan, dengan menerapkan Penilaian Berbasis Kelas (PKB) dengan berbagai ragamnya seperti potofolio, catatan, observasi, wawancara, performance test, proyek, dan produk (Hamid Hasan, 2000).

Dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum pendidikan multikultural, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: *Pertama*, penyusunan kurikulum harus didasarkan kepada keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, norma-norma, atau nilai-nilai absolute yang diambil dari agama-agama besar di dunia dan hubungan integral antara Tuhan, manusia, dan alam.

Kedua, karena ilmu pengetahuan dari Tuhan, manusia tidak dapat disebut sebagai pembuat ilmu pengetahuan. Namun, karena manusia dapat dengan

mudahnya menemukan aspek-aspek yang terkandung di dunia ini, maka nilai-nilai kemanusiaan dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk menyeleksi, menginvestigasi, dan menikmati adanya sebuah kebenaran.

Ketiga, peserta didik diharuskan mengetahui hierarki antara ilmu pengetahuan dan sumber nilai. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui sebuah pengalaman yang harus tunduk terhadap pengetahuan rasional, dan pengetahuan rasional harus tunduk terhadap norma-norma agama yang datang dari Tuhan.

Keempat, keimanan dan nilai-nilai harus diakui sebagai dasar kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, keduanya tidak boleh dipisahkan dalam proses belajar-mengajar. Ilmu pengetahuan tidak harus ditunjukkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pandangan agama. Dengan demikian, dalam pendidikan hal itu harus digunakan untuk mendorong nilai-nilai yang baik.

Kelima, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran absolute, tetapi suatu kebenaran dapat direalisasikan pada level yang berbeda-beda melalui perasaan, pemikiran, intuisi, dan intelektual. Keempat bentuk ini harus bekerja secara harmoni dan terintegrasikan ke dalam sebuah system pendidikan yang konprehensif.

Keenam, peserta didik harus didorong untuk mengetahui prinsi-prinsip *unity and diversity* dan menyadari adanya dasar-dasar keamanan yang menembus dunia biologis dan psikis. Ini sebuah refleksi terhadap kesatuan prinsip-prinsip pencapaian dunia. Dunia adalah sebuah system yang mempersatukan dan terdapat suatu hubungan integral diantara bagian-bagian yang berbeda-beda (Syamsul Mu'arif, 2000 : 102-103).

D. Model Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural

Banyak model kurikulum yang dapat digunakan para pendidik pada lembaga pendidikan formal. Misalnya Kurikulum Berbasis Multikultural.

Model kurikulum Berbasis Multikultural berbeda dengan kurikulum-kurikulum lainnya. Kurikulum tersebut dalam O'neil (2008 : 22) merupakan aliran pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan tiga filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Theodore Brameld, yaitu; perenialisme, esensialisme, progresifisme dan rekonstruksionalisme.

Perennialisme, pada dasarnya adalah sudut pandang dimana sasaran yang laik dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan kebenaran, dan nilai; yang abadi, tak terikat waktu, tak terikat ruang.

- 1) *Esensialisme*, tugas manusia adalah memahami hukum dan tatanan alam semesta hingga bias menghargai dan menyesuaikan diri dengannya.
- 2) *Progresifisme*, memiliki karakteristik progresifitas pendidikan yang duniawi, menjelajah, aktif dan evolusioner, terutama berorientasi kepada sebuah tafsiran tentang cara hidup liberal dalam budaya Amerika.
- 3) *Rekonstruksionisme*, memandang bahwa puncak pendidikan tidak terpisahkan dari latar belakang social dalam era kesejarahan tertentu. Pikiran adalah sebuah produk dari kehidupan masyarakat tertentu.

Dewey memfokuskan tentang kurikulum kepada pengalaman sehari-hari siswa. Dengan mempersiapkan peserta didik untuk aktivitas kehidupan tertentu, pendidikan memungkinkan peserta didik untuk mampu memecahkan masalah-masalah mereka hadapi secara teratur. Dengan demikian pendidikan multikultural yang dikembangkan diarahkan pada beberapa kompetensi dasar, diantaranya:

- 1) Mengembangkan kompetensi akademik standar dasar (*standar and basic academic skills*) tentang nilai persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat atau saling menghargai dalam beraneka jenis keragaman.
- 2) Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik (*a better understanding*) tentang latar belakang budaya dan agama sendiri dan juga budaya dan agama lain dalam masyarakat.
- 3) Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas (*intelligent decisions*) tentang isu-isu dan masalah keseharian (*real-life problems*) melalui sebuah proses demokratis atau penyelidikan dialogis (*dialogical inquiry*).
- 4) Membantu mengonseptualisasi dan mengaspirasikan konstruksi masyarakat yang lebih baik, demokratis, dan egaliter tanpa ada diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang universal.

Sejalan dengan konsep ini, Jhon Dewey merekomendasikan agar mempertimbangkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam mengembabangkan

kurikulum, *Pertama*, hakekat dan kebutuhan peserta didik. *Kedua*, hakikat dan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, masalah pokok yang dugumuli peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan pribadi lain dan masyarakat.

1. Tujuan Kurikulum Multikultural

Tujuan yang ingin di capai dalam penerapan model kurikulum multikultural yaitu untuk menghadapkan para peserta didik kepada berbagai tantangan, ancaman, hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari model kurikulum multukultural dalam penerapannya memungkinkan mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan mengadakan:

- a. Survai secara kritis terhadap masyarakat;
- b. Studi tentang hubungan antara individu atau antar kelompok dengan latar belakang ras, etnis, agama, gender dan budaya yang berbeda.
- c. Studi tentang latar belakang historis dan kecenderungan perkembangan sikap solidaritas, toleransi, atau perkembangan sikap diskriminatif dan sebagainya.
- d. Pengkajian tindakan nyata dalam dinamika sosial di tengah kehidupan masyarakat yang multi kultural.
- e. Evaluasi seluruh rencana dengan criteria, apakah telah memenuhi kebutuhan kepentingan sebagian besar peserta didik.

Berdasarkan tujuan di atas, melalui penerapan model kurikulum multikultural di atas setidaknya akan membangun mental peserta didik;

- a. Peka terhadap lingkungan sosial yang didalamnya terdapat berbagai kultur yang selalu dinamis;
- b. Lebih dewasa dalam menghadapi berbagai problem berupa ancaman tantangan dan peluang-peluang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
- c. Siap untuk melihat dan memahami isu yang berkembang dalam kehidupan sosial.

2. Pengembangan Kurikulum Multikultural

Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multicultural haruslah didasarkan pada prinsip:

- a. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat;
- b. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi;
- c. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik; dan
- d. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah sebagai berikut:

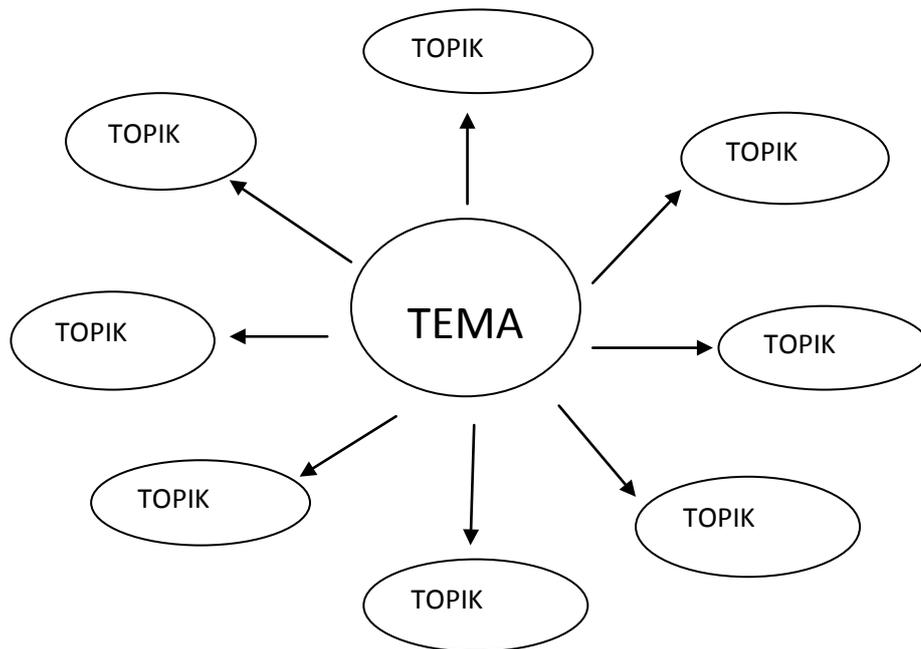
- a. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk pendidikan tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme harus dapat diubah ke arah filosofi kurikulum yang progresif seperti humanism, progresivisme, dan rekonstruksi sosial, yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan dunia.
- b. Teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, dan generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan ketrampilan yang harus dimiliki anak didik.
- c. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan anak didik dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan anak didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

- d. Proses belajar yang dikembangkan untuk anak didik juga harus berdasarkan proses yang dimiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan social. Artinya, proses belajar yang mengandalkan anak didik belajar secara individualistis dan bersaing secara kompetitif-individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kompetitif-individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar kelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan anak didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualistis, ekonomi, dan aspirasi politik.
- e. Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam, sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan, dengan menerapkan Penilaian Berbasis Kelas (PBK) dengan berbagai ragamnya seperti portofolio, catatan, observasi, wawancara, performance test, proyek, dan produk, (Jerry Aldridge dalam Ngainun Naim, 2008:199).

3. Metode dan Desain Kurikulum Multikultural

Berdasarkan tujuan dan isi model kurikulum multikultural, ada beberapa metode desain yang menjadi ciri dari model tersebut, yaitu:

- a. Belajar secara berkelompok, jika memungkinkan dalam kelompok anggota kelompok yang memiliki latar belakang budaya, etnis, gender atau agama berbeda, agar antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya terjadi proses interaksional. Dengan catatan bahwa proses pembelajaran tidak ada kompetisi, tetapi yang ada adalah kerjasama, pengertian dan konsensus.
- b. Belajar dipusatkan pada lingkungan masyarakat multikultural untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang mendesak.
- c. Pola pendidikan dengan pola organisasi roda, yaitu menempatkan tema utama di tengah kemudian dijabarkan dengan sejumlah topik yang mengelilingi tema utama tersebut. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Model Kurikulum Multikultural

Model kurikulum rekonstruks sosial penekanannya pada diversitas budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga karena mengacu pada kata pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Dalam prakteknya, belajar merupakan kegiatan bersama, ada kebergantungan antara seseorang dengan yang lainnya.

4. Evaluasi Model Kurikulum Multikultural

Evaluasi yang digunakan dalam kurikulum model multikultural haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan informasi dapat digunakan portofolio, catatan dan wawancara.

E. Kesimpulan

Berbicara mengenai multikultural dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang mempresentasikan kultur tertentu dalam masyarakat. Pendidikan multikultural memiliki identitas sikap pribadi maupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas itulah mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk interaksi antar budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural bukan merupakan satu bentuk pendidikan monokultur, akan tetapi model pendidikan yang berjalan di atas rel keragaman. Oleh karena itu, identitas lokal atau budaya lokal yang memiliki keragaman, merupakan muatan yang harus ada dalam kurikulum pendidikan multikultural.

Model kurikulum yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan multikultural menggunakan model tematik. Dengan menggunakan model tematik, peserta didik dapat memilih tema-tema mana yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi multikultural yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agil, Said Munawar Husin al-Munawar. 2006. *Fiqih Kehidupan antar Agama Menata Masyarakat Berbasis Multikultural*, dalam *Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Alwi, Muhammad. 2011. *Belajar Menjadi Bahagia dan Sukses Sejati*. Jakarta: Gramedia.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2003. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Bank, James A. dan Cherry A. McGee(ed). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bikhu Parekh. 1999. *What is Multiculturalism*. Jurnal India Seminar, Desember, Essays in the Morality of Law and Politics.
- _____. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fajar, Malik. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI.

- Friere Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. terj. Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- Hamid Hasan. S., 2000. "Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Januari-November 2000.
- J.V.Vergeuwen. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LkiS.
- Machfud, Choirul. 2011. *Pendidikan Multikultural*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mu'arif, Syamsul. 2000. 'Pendidikan Pluralisme di Indonesia, Jogjakarta: Rake Sarasin.
- Naim, Ngainun dkk. 2008. *Pendidikan Multi Kultural*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nasution. 1995. *Azas-Azas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- O'neil, William. 2008. *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Print, Murray. 1993. *Curriculum Development and Design*. St. Leonard: Allen & Unwin Pty.
- Tilaar H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____ 2011. *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.